

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari Uraian yang terdapat pada masing-masing Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1. Sensus Barang merupakan bagian kegiatan dari Inventaris Barang Milik Daerah. Pendataan Aset tetap dilakukan sesuai dengan Prosedur yang telah tertera pada Pelaksanaan Penatausahaan Aset tetap pada BPKAD Kota Padang dilakukan secara sistematis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
2. Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap masih memiliki beberapa Kendala dalam penatausahaan aset tetap pada BPKAD Kota Padang yaitu ketidaklengkapan data aset tetap atau tidak akurat, seperti tidak adanya informasi tahun perolehannya, nilai perolehan atau kondisi aset, belum terintegrasi data aset tetap dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, hilangnya dokumen pendukung terkait aset tetap seperti berita acara serah terima atau surat keputusan. Ketidakjelasan status kepemilikan atas sebagian aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Padang.

Ketidakkuratan Pencatatan Aset Tetap kendala yang dihadapi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya ketelitiannya dalam pencatatan, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah, atau kesalahan dalam memasukkan data ke dalam sistem pencatatan aset tetap.

## 5.2 Saran

Dalam Penatausahaan Aset Tetap, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang telah menggunakan aplikasi SIPKD-BMD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah – Barang Milik Daerah), yang diharapkan aplikasi ini bisa membantu meningkatkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap, tetapi juga berguna untuk manajemen Aset Tetap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu sendiri. Namun, dalam Penatausahaan Aset tetap masih terjadi beberapa kendala atau kesalahan (human error), terutama pada proses pencatatan Barang Milik Daerah, sehingga laporan yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menangani proses pencatatan Barang Milik Daerah (BMD), sehingga pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan melakukan Pelatihan staf di bidang Penatausahaan Aset Tetap dalam BIMTEK yang berkaitan dengan Pengelolaan BMD dari lembaga yang berwenang.